



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman  
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	30 Mei 2024	Media	Haluan
Kategori	EKONOMI & BISNIS	Jurnalis	h/mta

Harian Umum Independen

# HALUAN

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

## KLIPING KORAN

HARI : Kamis  
TANGGAL : 30 Mei 2024

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### OPTIMALISASI PEMBAYARAN HUTANG DAERAH

## Pemko Pariaman Lakukan Pergeseran Anggaran

PARIAMAN, HALUAN - Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman melakukan pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD 2024 untuk optimalisasi pembayaran hutang daerah. Penjabat (Pj) Wali Kota Pariaman, Roberia mengatakan, hutang pemko per Desember 2023 mencapai Rp7,1 miliar.

"Saat ini, kita tengah melakukan pergeseran anggaran. Kepala daerah berwenang untuk itu, karena ada perubahan prioritas pembangunan," katanya kepada *Haluan*.

Berdasarkan audit BPK, Roberia menyebut, hutang Kota Pariaman yang belum dibayarkan terhitung sejak tahun 2020. Nominalnya terus bertambah sampai tahun 2023.

Oleh sebab itu, sebelum masa kepemimpinannya berakhir, Roberia berharap hutang daerah bisa dilunaskan melalui pergeseran anggaran tanpa harus kembali menumpuk



ROBERIA

hutang. Ia membuat kebijakan "nol hutang," yang disepakati oleh DPRD Kota Pariaman.

"Artinya, kita harus mengubah fokus pembangunan di Kota Pariaman. Tinggal dipilih, mau bayar hutang atau bertutang lagi," ujarnya.

Kendati begitu, penjabat kepala daerah tersebut memastikankan bahwa pergeseran anggaran tidak akan memengaruhi aspirasi dewan dalam program pembangunan masyarakat. Ia juga telah merumuskan meka-

nisme perubahan APBD agar tidak mengorbankan gaji pegawai.

"Anggota dewan sepakat dengan kebijakan 'nol hutang'. Mereka meminta pembangunan masyarakat berdasarkan aspirasi mereka tetap jalan. Untuk mekanisme perubahan APBD ini akan ditampung serta jangan sampai gaji pegawai terkorbankan," paparnya.

Sementara itu, mengenai dana silpa dari anggaran tahun lalu, menurut Roberia tidak bisa melunaskan hutang daerah. Meski jumlahnya mencapai Rp7 miliar, tetapi dana tersebut hanya dapat dibayarkan sesuai peruntukannya saja.

"Dana silpa tidak bisa digunakan sembarangan karena ada peruntukannya. Seperti, bagi hasil sawit dari pusat hanya bisa digunakan untuk sarana prasarana, lalu hasil pengelolaan BLU yang digunakan kembali untuk instansi terkait," jelas Roberia. (h/mta)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman  
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	30 Mei 2024	Media	Haluan
Kategori	KETENAGAKERJAAN	Jurnalis	h/mta

Harian Umum Independen

# HALUAN

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

## KLIPING KORAN

HARI : Kamis  
TANGGAL : 30 Mei 2024

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### Pj Wali Kota Pariaman Lantik 12 Pejabat Mutasi

PARIAMAN, HALUAN - Penjabat (Pj) Wali Kota Pariaman, Roberia melantik 12 pejabat pemerintahan eselon III mutasi yang terdiri dari 10 pejabat administrator dan dua pejabat pengawas di Aula Balai Kota, Selasa (28/5) malam.

Sebagai Penjabat Kepala Daerah, ia menyebut, sudah melalui proses panjang hingga mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan mutasi pejabat.

"Kita sudah melakukan kajian yang panjang. Beberapa kali surat usulan mutasi dikembalikan untuk kemudian diperbaiki sampai akhirnya diterima," kata Roberia.

Mengenai alasan mutasi, ia tidak ingin dikaitkan dengan perasaan emosional terhadap beberapa polemik yang dialami pemko. Namun, sebagai pemimpin, ia juga memiliki penilaian dan tolak ukur atas kinerja pegawainya.

"Jangan dikaitkan dengan kejaadian kemarin, nggak ada kaitan. Dalam persoalan rotasi mutasi tentu seorang pemimpin punya penilaian, punya hal yang harus dilihat untuk menjadi tolak ukur kinerja," ujarnya.

Hasil penilaian tersebut yang katanya menjadi alasan pergantian posisi pejabat. Sebelumnya, Roberia juga telah membentuk tim penilaian kinerja yang dipastikan bertanggung jawab terhadap tugasnya.

"Tim penilai kinerja sudah melaksanakan tugasnya. Dari hasil penilaian, dapat dilihat seseorang itu akan lebih tepat di posisi apa. Itu juga ada mekanisme yang harus dipenuhi," kata Roberia.

Sementara itu, dari 12 pejabat yang dilantik,

empat di antaranya mendapat promosi jabatan. Roberia berharap, pejabat yang mendapat promosi bisa menjadi panutan.

"Namun, bukan berarti yang dimutasi menerima musibah. Mutasi sudah biasa kalau sudah lebih dari 1,5 tahun, bahkan sudah ada yang di posisi itu dua tahun lebih," katanya.

Ia tidak menutup kemungkinan bahwa pejabat yang dimutasi memiliki penilaian disiplin kinerja yang rendah. Sebab penilaian yang dilakukan mencakup disiplin kerja, perilaku, dan performa.

Lebih lanjut, akibat sejumlah pejabat yang mutasi dan promosi, ada beberapa jabatan yang kosong. Roberia mengatakan, pihaknya akan mengkaji ulang penempatan pejabat untuk mengisi kekosongan tersebut.

"Kalau melihat SK yang dibacakan, ada jabatan yang masih kosong. Tidak mudah bagi kita untuk mencari atau menempatkan seseorang, butuh kajian dari beberapa pejabat juga," tuturnya.

Adapun mutasi tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 132A Ayat (1) huruf a dan Ayat (2), disampaikan bahwa Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai ketentuan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

(h/mta)

